

Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis di Lampung

Karsiwan¹, Lisa Retno Sari²

^{1,2}IAIN Metro Lampung

Jalan. Ki Hajar Dewantara, No. 2 Kota Metro 34111

e-mail: ¹ karsiwan@metrouniv.ac.id, ² lisaretnosari24@gmail.com

Abstract: Education Policy of the Dutch Colonial Government during the Ethical Policy Period in Lampung. The purpose of this study was to determine the policy of the Dutch colonial government in the field of education during the ethical politics in Lampung. The methods used in this study is a historical method with data collection techniques through literature study and documentation techniques. Data analysis techniques used are qualitative data analysis techniques. Based on the results of the study, it was found that the administration of education during the period of ethical politics became more massive since Governor General Van Heutz allowed the establishment of village schools, with funding sources by the village community. School construction, procurement of teaching staff and salary budget are sourced from the village treasury. Only then did the Dutch colonial government become involved in providing education subsidies from 1922 to 1942. The number of schools in the Lampung Residency consisted of 42 village schools, 4 community schools and 6 secondary schools spread in Onder Afdeling Teluk Betung and Kota Agung.

Keywords: Educational Policy, Ethical Politics, Lampung Residency, Village Schools

Abstrak: Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis di Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam bidang pendidikan pada masa politik etis di Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan teknik pengumpulan data melalui teknik studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Penyelenggaraan pendidikan pada masa politik etis semakin masif sejak Gubernur Jenderal Van Heutz mengizinkan pendirian sekolah-sekolah desa, dengan sumber pembiayaan oleh masyarakat desa. Pembangunan sekolah, pengadaan tenaga pengajar dan anggaran gaji guru bersumber dari keuangan desa. Subsidi biaya penyelenggaraan pendidikan di Lampung baru diberikan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1922 hingga 1942. Jumlah keseluruhan sekolah yang tercatat di Karesidenan Lampung terdiri dari 42 sekolah desa, 4 sekolah rakyat dan 6 sekolah lanjutan yang tersebar di Onder Afdeling Teluk Betung dan Kota Agung.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Politik Etis, Karesidenan Lampung, Sekolah Desa

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sarana mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan. Dewasa ini, pendidikan tampil sebagai salah satu prasyarat utama dalam melamar suatu pekerjaan. Penduduk Indonesia sudah mengenal sistem pendidikan jauh sebelum kedatangan dan dominannya dominasi penjajahan bangsa Barat. Sistem pendidikan yang berkembang di Nusantara merupakan sistem pendidikan agama Islam dalam berbagai bentuk pengajarannya (sistem pondok pesantren, langgar atau surau) hal yang tentunya berbeda dan terasa asing

bagi bangsa Barat di Nusantara.¹

Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa terdapat stigma dan kecenderungan untuk menilai bahwa tidak ada sesuatu hal yang baik yang telah dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda selama menguasai dan menjajah wilayah Nusantara. Meskipun demikian, perkembangan pendidikan di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan campur tangan pemerintah kolonial Belanda, sehingga masih dapat kita maknai sebagai tindakan untuk mengangkat derajat penduduk bumiputera. Terlepas dari apapun motivasi dilaksanakannya politik pendidikan, apakah dengan

itikad baik atau buruk.

Terlaksananya sebuah kebijakan politik pendidikan tentunya memiliki landasan dasar dalam praktek pelaksanaannya. Aturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk pribumi sudah dimulai sejak tahun 1818 dimana setiap penduduk diperbolehkan masuk ke sekolah-sekolah Belanda dengan syarat dan ketentuan yang diatur pemerintah.² Meskipun demikian, jumlah penduduk pribumi yang mampu mengenyam pendidikan masih dalam skala yang terbatas dengan siswa yang terbatas. Siswa yang dapat mengenyam pendidikan hanya diwakili dan terlihat pada golongan bangsawan, elite lokal dan pemeluk Kristen.

Terbatasnya siswa ini akibat dari akses pendidikan yang hanya dinikmati oleh kalangan elite kerajaan dan bangsawan pribumi. Pembatasan terakhir pada akhirnya hilang pada tahun 1863, melalui kebijakan Menteri Frans v.d Putte seorang tokoh liberal, dengan ketetapan bahwa setiap penduduk pribumi berhak memperoleh kesempatan pendidikan.³ Melalui kebijakan ini, pada akhirnya menyebabkan terjadi perluasan akses pendidikan, dan pendirian sekolah baru, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1: Jumlah Sekolah Pribumi di Hindia Belanda

Tahun	Jumlah Sekolah Pribumi
1864	186
1882	512

Sumber: Brugmans, 1987.⁴

Berdasarkan data diatas terlihat perkembangan pendidikan pada pertengahan abad ke-19 menunjukkan sebuah dinamika dan perkembangan yang menggembirakan dengan peningkatan pendirian sekolah mencapai 4 kali lipat jumlah sekolah dalam kurun waktu 28 tahun terakhir. Keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, kemudian diikuti dengan perluasan sekolah-sekolah telah mengakibatkan ter-

jadinya persoalan dalam hal pendaanaan dan penyediaan tenaga guru di berbagai wilayah di Nusantara. Keterbatasan dana dan pemerintah kolonial Belanda kemudian melahirkan sistem pendidikan kelas 2 dengan bahasa pengantar yakni bahasa Melayu dan daerah sebagai bahasa pengantar pendidikan. Pada waktu itu penyelenggaraan pendidikan pada jenjang sekolah dasar bagi penduduk pribumi secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sekolah Dasar Kelas Satu (De School der Eerste klasse). Secara umum sekolah berada di ibukota karesidenan, dan kewedanaan, hingga kecamatan, dan di kota-kota yang menjadi pusat-pusat perdagangan dan perekonomian. Siswa yang memiliki akses dan bersekolah ialah anak dari golongan masyarakat atas, bangsawan, tokoh terkemuka, dan kelompok bumiputera yang memiliki kedudukan terhormat pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan tujuan dari sekolah sebagai pemenuhan kebutuhan pekerja pada lembaga administrasi pemerintahan, perusahaan swasta, dan perdagangan. Masa belajar pada Sekolah Kelas Satu adalah 3 tahun, dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa Melayu dan bahasa daerah, tetapi dan secara bertahap kemudian diganti dengan bahasa Belanda.
2. Sekolah Dasar Kelas Dua (De Schoolen der Tweede Klasse). Sekolah Kelas Dua didirikan di distrik-distrik atau desa-desa (marga) sehingga disebut juga Sekolah Desa. Pendirian sekolah ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan masyarakat umum. Dengan kata lain, sekolah tersebut disediakan bagi anak-anak pribumi dengan tujuan untuk mendidik calon-calon pegawai rendah. Lama belajar pada Sekolah Dasar Kelas Dua adalah lima tahun. Perbedaan antara jenjang Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua dapat dilihat dari tempat atau lokasi sekolah dan latar belakang sosial ekonomi siswa yang menjadi pelajar.

Dapat dilihat juga dari lama belajar, kurikulum, tenaga pengajar, dan uang sekolah.⁶

Desakan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada penduduk pribumi itu semakin menguat melalui kalangan liberal di negeri Belanda menyuarakan pentingnya pembangunan sumberdaya manusia masyarakat pribumi melalui kesempatan memperoleh pendidikan. Hal ini tentunya memiliki alasan mendasar mengingat negeri Belanda sudah mendapatkan begitu banyak keuntungan selama menduduki dan menguasai wilayah nusantara. Terlebih kondisi penduduk pribumi yang tertinggal dan tingginya buta huruf menyebabkan munculnya desakan untuk perbaikan kualitas hidup penduduk pribumi.

Perkembangan pendidikan di Nusantara menjelang diberlakukannya politik etis belum menampakkan angka-angka yang signifikan. Pertumbuhan jumlah sekolah di Jawa belum diimbangi dengan perkembangan sekolah dan jumlah siswa yang terlibat di luar Jawa. Adapun perkembangan sekolah dan siswa di Jawa dan Sumatera pada dasawarsa pertama abad XX dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Jumlah sekolah dan murid di Jawa dan Sumatera, 1900-1920

Tahun	Sekolah di Jawa		Sekolah di Sumatera	
	Sekolah	Murid	Sekolah	Murid
1900	238	43617	82	12427
1901	254	47911	86	12692
1902	265	50734	95	13685
1903	285	54951	100	14838
1904	301	64064	109	-
1905	313	71256	-	-
1910	613	126550	142	26126

Sumber: Suwignyo dalam Fakhriansyah, 2019.⁷

Pendirian fasilitas di sekolah dan sarana penunjang pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada dasarnya memiliki tujuan

untuk menjadikan penduduk pribumi agar dapat mengabdikan pada kepentingan kolonial Belanda. Penyelenggaraan pendidikan dengan kata lain bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu membaca dan menulis pada lembaga administrasi pemerintah kolonial dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat status dan kedudukan penjajah kolonial Belanda. Para pekerja lulusan sekolah ini kemudian mengabdikan kepada kepentingan Belanda, karena itu tujuan pendidikan diarahkan kepada kepentingan kolonial, sehingga isi pendidikan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang dapat berguna membantu dan mempertahankan kekuasaan elite politik dan ekonomi penjajah.⁸

Perkembangan pendidikan di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari keinginan dan usaha yang berhasil dari perjuangan Partai Liberal di Negeri Belanda. Meskipun demikian pada umumnya Kaum Liberal belum merasa puas dengan Peraturan Pemerintah 1854. Peraturan itu sama sekali tidak menyebut masalah pembiayaan untuk daerah jajahan, meskipun tampak adanya perluasan hampir di setiap kota yang biayanya tidak lebih dari yang ditentukan yaitu 25.000 gulden setahun. Dengan adanya perluasan pendidikan tersebut jelas memerlukan tenaga pengajar. Tidak mungkin pemerintah mendatangkan tenaga pengajar dari Negeri Belanda. Karena itu tenaga pengajar harus diambilkan dari penduduk pribumi. Pertimbangan ini dirasa perlu sekali oleh pemerintah jajahan untuk mendirikan sekolah kejuruan.

Sejak tahun 1848 gubernur jenderal telah memiliki otoritas dan kuasa untuk menggunakan anggaran keuangan sebesar f. 25.000/tahun untuk digunakan dalam pendirian sekolah-sekolah untuk kalangan orang Jawa, teristimewa bagi pendidikan pegawai-pegawai bangsa pribumi. Anggaran pendidikan bagi penduduk pribumi pada tahun 1905 dimana didalamnya termasuk tunjangan untuk sekolah-sekolah swasta sebesar f 2 juta, sehingga apabila

dibagi jumlah penduduk yang menikmati sekolah sebanyak 40 juta penduduk, maka anggaran pendidikan untuk penduduk pribumi hanya 5 sen per orang.¹⁰

Karesidenan Lampung pada awalnya merupakan suatu daerah mandiri dengan kepemimpinan marga dengan punyimbang sebagai pemimpinnya, kemudian beralih menjadi daerah bawahan kesultanan Banten sejak para punyimbang melakukan seba ke Banten dan berakhir dengan pengakuan pemimpin wilayah Lampung terhadap kekuasaan Kesultanan Banten.¹¹ Estafet kepemimpinan atas wilayah Lampung kemudian beralih pada Belanda sejak Daendles menghapuskan Kesultanan Banten pada 21 November 1808".¹²

Karesidenan Lampung ketika berada di bawah kekuasaan Belanda dan disaat yang bersamaan kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat Jawa menunjukkan gejala penurunan kesejahteraan dan kemakmuran sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk, dan semakin terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan terjadinya kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas. Kondisi ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda mendapatkan kecaman dan kritik dari para pejuang kemanusiaan dan liberal di Negeri Belanda agar memperhatikan kondisi masyarakat jajahan. "Tokoh-tokoh yang mengkritik tersebut antara lain Van Deventer, Van Koll dan P. Brooshooff serta Baron Van Hoeffell anggota parlemen Belanda yang mendesak pemerintah untuk menjalankan politik balas budi terhadap penduduk pribumi atas keuntungan yang diperoleh dari tanah jajahan di Hindia Belanda."¹³

Kebijakan etis berangkat dari pernyataan Ratu Wilhelmina di dalam pidatonya yang disampaikan pada tahun 1901 menyatakan bahwa, pemerintah kolonial akan melakukan perbaikan nasib penduduk pribumi Indonesia, melalui tiga kebijakan politiknya, yaitu: perluasan pendidikan (edukasi), pembangunan pertanian (irigasi), dan pemindahan penduduk (emigrasi).¹⁴ Kebijakan ini kemudian dikenal secara luas sebagai kebijakan politik etis (politik

kemanusiaan).

Tindaklanjut dari pidato itu dan mencermati isu tentang keadaan ekonomi penduduk sebagai dampak dari politik tanam paksa dan liberal, pada tahun itu juga Ratu Belanda menganjurkan supaya diadakan penelitian di berbagai bidang kehidupan. Kebijakan balas budi ini bertujuan untuk memperbaiki dan menangani perbaikan kualitas hidup penduduk Jawa dengan melakukan berbagai langkah diantaranya perbaikan jalan desa, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembuatan jaringan irigasi sebagai penunjang keberhasilan pertanian, pemerataan jumlah penduduk dari yang padat (Jawa) ke daerah yang jarang (luar Jawa).

Pelaksanaan kolonisasi pertama di Karesidenan Lampung dilaksanakan dengan ujicoba penempatannya di Bagelen (1905), Wonosobo (1922), Trimurjo (1932), dan Sukadana (1932). Pemindahan penduduk Jawa ini menggunakan jalur laut, setelah dilakukan pendataan dan pengecekan kesehatan calon kolonis. Kolonis asal Jawa kemudian tiba di Lampung melalui pelabuhan Panjang yang terletak di pesisir selatan wilayah Lampung, dekat dengan ibukota Karesidenan Lampung.



Gambar 1. Kedatangan Kolonis asal Jawa di Pelabuhan Panjang, Lampung.¹⁶

Pemindahan penduduk dari Jawa ke Lampung ini cukup beralasan selain daerah yang dekat dengan Pulau Jawa, jauh sebelum itu telah terjadi perpindahan penduduk asal Banten sebagai buruh pemetik lada pada perkebunan milik penduduk asli. Daerah Bagelen dipilih selain karena

lokasinya tidak jauh dari ibukota Karesidenan, ketercukupan dan ketersediaan air sebagai prasyarat pertanian padi di sawah di daerah ini dapat dikatakan tercukupi berdasarkan laporan Schalkwijk.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa daerah-daerah Karesidenan Lampung pada pertengahan abad ke-19 merupakan wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya masih rendah. "Jumlah penduduk pada waktu itu tidak lebih dari 80 ribu jiwa pada wilayah yang luasnya 29.365 kilometer persegi. Kepadatan penduduk tidak sampai 3 juta jiwa/km².¹⁷

Proses pemindahan penduduk ini pada kenyataannya disinyalir menjadi sarana untuk mendatangkan pekerja untuk dijadikan buruh yang dapat dipekerjakan pada daerah-daerah perkebunan atau daerah pertambangan milik Belanda. Kondisi terlihat pada penempatan para kolonis disekitar perkebunan swasta milik Belanda, dan atau ditempatkan diantara lokasi penduduk asli Lampung (seperti Bagelen yang terletak diantara Teluk Betung dan Kota Agung, lokasi kolonisasi Trimurdjo terletak diantara Tegineneng dan Sukadana). Perhatian pemerintah kolonial terhadap masalah kolonisasi semakin besar ketika adanya tuntutan penghapusan Poenale Sanksi di awal tahun 1920an oleh parlemen Belanda. "Poenale Sanksi merupakan suatu peraturan yang mengatur tata cara pemberian hukuman kepada para pekerja perkebunan yang melanggar aturan kerja.

Pemerintah kolonial Belanda menggiatkan pembangunan jaringan irigasi di daerah Pringsewu tahun 1927 sebagai pendukung pertanian masyarakat pada kolonisasi Bagelen di Gedong Tataan. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan irigasi Argoguruh tahun 1935 sebagai pendukung kolonisasi Trimurjo-Sukadana. Kajian mengenai rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi telah dilakukan pada masa Schalkwijk yang bertugas sebagai pimpinan kolonisasi telah dilakukan berbagai perencanaan dan kajian untuk pembuatan jaringan irigasi (talang) di sebelah utara Sungai Way Tebu yang

merupakan sebuah sungai yang terdapat di daerah Pringsewu, Lampung.¹⁸

Proses pembangunan jaringan irigasi pada praktek pelaksanaannya melibatkan penduduk asli dan para kolonis yang sengaja ditempatkan diantara pemukiman penduduk asli. Proses pengerjaan dan pemantauan pengerjaan dilakukan melalui para kepala desa yang dikuatkan melalui peraturan pemerintah lewat peraturan Heerendiensten.¹⁹



Gambar 2. Bendungan saluran Irigasi Dekat Metro, Lampung.²⁰

Sebagai praktek pelaksanaan politik etis dalam bidang pendidikan di Karesidenan Lampung banyak didirikan sekolah desa baik milik pemerintah maupun milik penduduk yang tersebar di beberapa lokasi di Karesidenan Lampung.¹⁸

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam bidang pendidikan pada masa politik etis di Lampung pada kurun waktu 1905 hingga 1942. Termasuk di dalamnya bagaimana proses pendirian sekolah, perkembangan sekolah hingga bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam menetapkan standar biaya pendidikan termasuk biaya pendidikan dan gaji para guru pada saat itu. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan, sumbangsih, dan tindakan pemerintah kolonial Belanda pada bidang pendidikan di Indonesia khususnya daerah Lampung pada kurun waktu 1905 hingga 1942.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan penelitian meliputi

heuristik, verifikasi data (kritik intern dan ekstern), interpretasi dan historiografi. Pada tahap heuristik atau pengumpulan data, penulis mencari dan menghimpun berbagai sumber, informasi, yang berasal dari masa lampau yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang sedang diteliti.

Sumber data yang telah terkumpul kemudian dilakukan verifikasi data melalui kritik intern dan ekstern, untuk melihat keaslian dan kredibilitas sumber data sejarah yang didapatkan (Kuntowijoyo, 2013: 77-78). Hal ini dilakukan agar data tidak serta merta diterima begitu saja tetapi telah melalui serangkaian uji data.

Pada tahap interpretasi sumber-sumber primer yang telah didapatkan dibandingkan sumber-sumber lain baik sekunder ataupun tersier. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan pemaknaan. Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mengkaitkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, sehingga diperoleh sebuah gambaran peristiwa secara utuh dan kronologi serta saling berkaitan antara politik etis dan perkembangan pendidikan di Lampung. Tahap terakhir historiografi yaitu penulisan sejarah. Penulisan sejarah disusun secara kronologis dengan memperhatikan aspek kausalitas narasi hasil temuan mengenai kebijakan etis pemerintah kolonial Belanda di Lampung tahun 1905-1942.

Pembahasan

Karesidenan Lampung pada awalnya merupakan daerah dibawah Kesultanan Banten kemudian beralih ke pemerintah kolonial Belanda sejak kesultanan Banten dihapuskan Daendels. Kebijakan Pemerintah kolonial Belanda semasa menguasai Lampung pada masa politik etis terdiri dari pemindahan penduduk (kolonisasi), pendirian sekolah-sekolah (edukasi), dan pembangunan saluran irigasi.

Praktek pelaksanaan Politik Etis dalam bidang pendidikan dilakukan dengan cara mendirikan berbagai sekolah seperti: sekolah desa missie, HIS (Hollandsche Inlandsche School) dan sekolah vervolg pemer-

intah serta pembangunan sekolah-sekolah desa yang tersebar diberbagai desa baik desa penduduk asli, maupun desa penduduk pendatang (kolonis) di Lampung. secara umum, pendirian sekolah sekolah diatas dikelompokkan menurut jenjang mutu dan kualitas pendidikan, serta berdasarkan ras dan kelas sosial seperti sekolah untuk golongan Eropa, Arab, India, China dan Pribumi. (Suwignyo, 2019: 113). Perkembangan pendidikan di Karesidenan Lampung pada masa politik etis untuk lebih jelas lihat penjelasan berikut:

a. Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis

Kelas atas masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda di dominasi oleh kaum priyayi, elite dan bangsawan yang terhormat dan kaya. Kelompok elite masyarakat Indonesia inilah yang mampu dan memperoleh akses pendidikan. Meskipun dalam prekatek pengajaran di sekolah, kelompok elite ini tetap mendapatkan perlakuan diskriminasi rasial bersama kelompok etnis China dalam memperoleh akses pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan terpenting yang dihasilkan pemerintah kolonial Belanda. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa politik pendidikan bukan hanya bagian dari politik kolonial akan tetapi merupakan inti politik kolonial (Nasution, 2011: 3).²⁵ Kebutuhan pemerintah kolonial Belanda untuk menyelenggarakan pendidikan di tanah jajahan lebih berorientasi pada semangat kolonialisme itu sendiri, yaitu suatu bentuk pendidikan sebagai tiang penyangga kekuasaan politik penjajahan (Zed, 2012: 174).

Beberapa ciri umum kebijakan pendidikan kolonial Belanda sebagai berikut: 1. Gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia; 2. Dualisme sistem pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pribumi; 3. Kontrol sentral yang kuat; 4. Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor

penting dalam perkembangan pendidikan; 5. Prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Hindia Belanda sama dengan di Belanda; dan 6. Belum adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi (Nasution, 2011: 20; Imadudin, 2015: 546).

Pemerintah Kolonial Belanda dalam praktik penyelenggaraan pendidikan telah melakukan diskriminasi terhadap penduduk bumiputera, baik secara sosial, rasial, politik maupun agama. Seperti nampak pada perbedaan jenis-jenis sekolah antara sekolah yang dikhususkan untuk kaum bangsawan (keluarga raja, elite, punyimbang) dengan sekolah untuk rakyat biasa (biasa disebut sekolah Ongko Loro), atau antara penduduk pribumi yang sekolah di HIS (Hollandsche Inlandsche School) dengan sekolah dasar ELS (Europeesche Lager School), bagi golongan Eropa (Depdikbud, 1976: 52). Jumlah sekolah yang tersedia semakin menunjukkan terjaidnya diskriminasi dan perbedaan. Keadaan sekolah-sekolah pribumi jumlahnya terbatas dengan fasilitas yang kurang memadai, berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah anak-anak Belanda dan Eropa lainnya.

Perluasan Pendidikan bagi anak-anak pribumi semakin masif sejak tahun 1907 dengan bergantinya haluan pemerintah kolonial Belanda. Pendirian sekolah pada awalnya merupakan wewenang pemerintah, berganti dengan pelibatan masyarakat dalam pendirian sekolah (sekolah desa). Gubernur Jenderal Van Heutz, mengawali dengan mengizinkan pendirian sekolah-sekolah desa, sekolah sederhana untuk masa belajar tiga tahun pengajaran dengan sumber pembiayaan oleh masyarakat desa (Brugmans, 1987: 179).

Pendirian sekolah desa memiliki kriteria dan syarat tersendiri dalam melibatkan masyarakat desa. Adapun syarat pendirian sekolah desa terdiri atas, 1) pembangunan dan gaji guru sekolah desa ditanggung oleh desa, sedangkan pemerintah hanya membantu sarana belajar, 2) pembangunan sekolah harus melewati masa percobaan, 3) tidak diperbolehkan memaksa murid

untuk bersekolah (Nurhusna, 2020: 27). Keterlibatan masyarakat dalam pendirian sekolah-sekolah desa baik secara mandiri maupun swadaya berdampak semakin banyaknya sekolah desa yang berdiri sehingga berimplikasi kepada semakin terbukanya akses pendidikan bagi masyarakat pribumi.

Pendirian sekolah desa yang semakin tumbuh di wilayah-wilayah kolonisasi dan penduduk asli tidak serta merta membuat animo masyarakat juga tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat belum begitu tertarik dengan sekolah umum, mengingat masyarakat pribumi merupakan masyarakat agraris dan lebih cenderung untuk memberikan pendidikan agama.

b. Kebijakan Pendidikan di Lampung pada Masa Politik Etis

Perluasan akses pendidikan bagi penduduk di Lampung baik asli maupun pendatang (kolonis) semakin masif sejak digalakkannya kebijakan etis pemerintah Belanda dengan dilakukannya kolonisasi tahun 1905. Kebijakan kolonisasi diberbagai daerah di Lampung pada akhirnya mampu merubah pola pikir pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di Nusantara. Perubahan ini terlihat dari yang pada awalnya keterlibatan pemerintah sebagai prasyarat utama menjadi keterlibatan aktif penduduk dalam pendirian sekolah, dari pendirian sekolah berbasis inisiatif pemerintah menjadi pendirian sekolah atas prakarsa masyarakat (sekolah desa).

Keterlibatan masyarakat dalam pendirian sekolah-sekolah desa berdampak kepada semakin terbukanya akses pendidikan bagi masyarakat desa baik pada masyarakat asli maupun pendatang yang ada di Karesidenan Lampung. Meskipun dalam perkembangannya, partisipasi anak sekolah pribumi tidaklah begitu menggembirakan. Hal ini terjadi karena kultur masyarakat pertanian dengan basis pedesaan menyebabkan pandangan bahwa lebih baik membantu orangtua di sawah daripada bersekolah. Sehingga sebagian besar orangtua tidak menghendaki

anak-anak bersekolah, dan lebih berharap anak-anak membantu pekerjaan orangtua di sawah dan ladang.

Praktek pelaksanaan pendidikan di Lampung ditandai dengan pendirian gedung-gedung sekolah baik sekolah milik pemerintah maupun sekolah milik penduduk desa. Tenaga pengajar dan pegawai sekolah bukan merupakan guru pegawai negeri, melainkan pegawai desa dengan anggaran gaji bersumber dari kas desa. Terbatasnya anggaran dan kemampuan keuangan pada kas desa kemudian berdampak pada permasalahan gaji dan kesejahteraan guru dan pegawai sekolah. Baru sejak tahun 1922 pemerintah kolonial Belanda mulai memberikan ganti rugi kepada kas desa dalam menangani persoalan pendidikan di desa.



Gambar 3. Sekolah Desa pada Kolonisasi Lampung³¹

Residen Lampung mengeluarkan besluit tanggal 17 Juni 1939 tentang pendirian sekolah desa baru diberbagai wilayah di Lampung. melalui besluit ini terjadi lonjakan yang luar biasa dalam pendirian sekolah yang semakin banyak, seperti:

- a. Di bedeng 12b, 23a, 24a, 25b, 27, dan desa Rancang Purwo semuanya terdapat dikolonisasi Sukadana, onder afdeling Sukadana;
- b. Di desa Srikaton dan Way Sukaraja kolonisasi Wonosobo baru onder afdeling Wonosobo;
- c. Di Gunung Tiga, kolonisasi Ulu Belu onder afdeling Kota Agung;

- d. Di desa Ganjaran, Bumi Arum kolonisasi Gedong Tataan onder afdeling Teluk Betung;
- e. Di desa Warga Mulya, Merga Way Lima onder afdeling Teluk Betung;
- f. Di desa Mergodadi dan Ambarawa, Merga Way Lima onder afdeling Teluk Betung;
- g. Di Kemiling, marga Teluk Betung onder afdeling Teluk Betung;
- h. Di Gunung Sugih Besar, marga Sekampung Udik onder afdeling Sukadana;
- i. Di Tebing, marga Melinting onder afdeling Sukadana;
- j. Di Tulung Buyut, marga Bunga Mayang onder afdeling Kota Bumi;
- k. Di Kota Bumi, marga Nunyai onder afdeling Kota Bumi;
- l. Di Betung, marga Pematang Sawah onder afdeling Kota Agung.³²

Besluit Residen Lampung diatas menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda semakin gencar dalam membangun dan memfasilitasi pendirian sekolah-sekolah desa. Hampir disetiap wilayah kolonisasi dan masyarakat asli Lampung yang tersebar pada wilayah-wilayah marga, berdiri sekolah-sekolah desa. Sedangkan untuk sekolah-sekolah lanjutan (Vervolgschool) hanya didirikan di ibukota Karesidenan Lampung yakni di Teluk Betung.

c. Perkembangan Sekolah di Lampung pada Masa Politik Etis

Perluasan daerah kolonisasi di Lampung selanjutnya diikuti dengan perluasan pendirian sekolah-sekolah desa melalui sebuah besluit kepala pemerintahan Karesidenan Lampung. Pendirian sekolah-sekolah desa sebagian besar menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pemerintahan desa, dengan kas desa sebagai sumber pembiayaan utama. Tak jarang pendirian sekolah melalui hasil swadaya masyarakat ataupun inisiatif warga masyarakatnya.

Pada Onder Afdeling Teluk Betung sebagai ibukota Karesidenan Lampung pendirian sekolah dan perkembangan jumlah

murid terlihat lebih baik apabila dibandingkan dengan perkembangan sekolah di wilayah lain. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa penduduk di ibukota karesidenan lebih memiliki pemikiran dan penghasilan yang mencukupi dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Jumlah sekolah desa milik penduduk yang berhasil didirikan di afdeling Teluk Betung dengan data sebaran pendirian sekolah sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah Sekolah Pribumi di Onder Afdeling Teluk Betung, Karesidenan Lampung

<i>Marga</i>	Sekolah Desa	Sekolah Rakyat	Sekolah Lanjutan
Kolonisasi Gd. Tataaan	11	4	3
Way Semah	2	0	0
Way Lima	8	0	1
Jumlah	21	4	4

Sumber: Majalah Pelita Marga, 1937³³

Berdasarkan Tabel 3 diatas, daerah Teluk Betung sebagai ibukota Karesidenan Lampung memiliki 21 sekolah desa, 4 sekolah rakyat dan 4 sekolah Lanjutan. Sekolah-sekolah desa tersebar pada daerah kolonisasi Bagelen di Gedong Tataan, dan daerah Marga pada penduduk asli di marga Way Semah dan Way Lima. Sekolah Lanjutan hanya terdapat di daerah Pringsewu, Gading Rejo, dan Bulukerto pada masyarakat kolonis Jawa, serta di Kedondong pada masyarakat asli di marga Way Semah.

Wilyah diluar ibukota Karesidenan Lampung meskipun dengan data dan informasi terbatas masih dapat menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan. Pada Onder Afdeling Kota Agung sebagai daerah luar kota terdapat berbagai sebaran pendirian sekolah sebagai berikut:

Tabel 4: Jumlah Sekolah Pribumi di Onder Afdeling Kota Agung, Karesidenan Lampung

<i>Marga</i>	Sekolah Desa	Sekolah Rakyat	Sekolah Lanjutan
Benawang	1	0	0
Ngarip	2	0	0
Buay Belunguh	1	0	0
Limau- Putih- Pertiwi	3	0	0
Gunung Alip	4	0	1
Reb.Pugung	2	0	0
Pematang Sawah- Wonosobo	5	0	0
Ulu Belu- Plaatselijk Fonds	3	0	1
Jumlah	21	0	2

Sumber: Majalah Pelita Marga, 1937.³⁴

Berdasarkan Tabel 4 diatas, daerah Onder Afdeling Kota Agung memiliki 21 sekolah desa, dan 2 sekolah lanjutan. Sekolah-sekolah desa tersebar pada berbagai daerah marga pada Karesidenan Lampung, dan daerah kolonisasi seperti Gedong Tataan dan Wonosobo. Sekolah Lanjutan hanya terdapat di daerah penduduk asli pada marga Gunung Alip daerah Talang Padang dan Plaatselijk Fonds di Kota Agung.

Data sebaran sekolah pada Karesidenan Lampung pada akhir tahun 1937 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang terdapat pada dua Onder Afdeling yakni Teluk Betung dan Kota Agung sebagai pusat perdagangan dan perekonomian, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5: Jumlah Sekolah Pribumi di Karesidenan Lampung

<i>Onder Afdeling</i>	Sekolah Desa	Sekolah Rakyat	Sekolah Lanjutan
Telukbetu ng	21	4	4
Kota Agung	21	0	2
Total	42	4	6

Sumber: Majalah Pelita Marga, 1937.³⁵

Untuk daerah Onder Afdeling Kota Agung memiliki 21 sekolah desa, dan 2 sekolah Lanjutan. Sekolah Lanjutan hanya terdapat di daerah Talang Padang dan Kota Agung.

d. Sumber Pembiayaan Sekolah

Sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan melalui sekolah-sekolah desa dari 1907 hingga 1922 murni merupakan hasil gotong royong dan swadaya masyarakat desa. Pembangunan gedung, perekrutan tenaga guru, pegawai hingga pembayaran gaji murni merupakan sumbangan masyarakat desa. Baru kemudian mulai diikuti oleh kebijakan pemerintah dalam bentuk subsidi biaya sekolah sejak tahun 1922 dengan memberikan ganti rugi kepada kas desa dalam menangani persoalan pendidikan di desa. Bantuan pemerintah kolonial Belanda sempat terhenti akibat terjadinya depresi ekonomi.

Pembiayaan sekolah-sekolah Desa di Karesidenan Lampung telah diumumkan pemerintah kolonial Belanda melalui majalah pelita Marga nomor 10 bulan April 1933. Bahwa tarif pembiayaan dan uang sekolah pada sekolah-sekolah marga atau desa di Karesidenan Lampung didasarkan atas tarif uang sekolah yang ditetapkan pemerintah. Penetapan besaran tarif uang sekolah untuk sekolah-sekolah pemerintah khususnya untuk sekolah kelas 2 mengacu kepada keputusan pemerintah pada Statsblad 1926 no. 530 dengan berbagai tarif dan jenis pembayarannya.

Tarif uang sekolah yang dimaksud itu hanya mempunyai 5 kelas pembelajaran. Seiring dengan semakin meningkatnya partisipasi murid yang bersekolah, dan sejak diberlakukannya tarif-tarif pembayaran berdasarkan golongan tersebut mendapatkan keluhan dan persoalan dalam pembayarannya karena dirasakan terlalu berat untuk orang tua semua murid. Maka kelas pembayaran orangtua siswa ditambah dengan golongan 6 dan 7 berdasarkan Statsblad 1933 No. 285. Penambahan kelas/golongan 6 dan 7 tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuan-

gan wali murid dengan mempertimbangkan tanggungan, dan penghasilan.

Kelas-kelas pembayaran dan tarif uang sekolah yang harus dibayarkan oleh orang tua murid mengacu pada aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Besaran tariff biaya sekolah penduduk pribumi setelah ditambah dengan kelas 6 dan 7 berdasarkan Statsblad 1933 No. 285 adalah sebagai berikut.

Tabel 6: Kelas Pembayaran pada Sekolah Desa di Karesidenan Lampung

Kelas	1 orang murid	2 orang murid	3 orang murid	lebih dari 3 murid
1	f. 1,25	f. 1,85	f. 2,25	f. 0,24
2	f. 0,8	f. 1,2	f. 1,44	f. 0,16
3	f. 0,5	f. 0,7	f. 0,82	f. 0,08
4	f. 0,25	f. 0,37	f. 0,45	f. 0,06
5	f. 0,15	f. 0,21	f. 0,27	f. 0,05
6	f. 0,1	f. 0,15	f. 0,18	f. 0,03
7	f. 0,05	f. 0,07	f. 0,09	f. 0,01

Sumber: Majalah Pelita Marga, 1933.³⁸

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pemerintah kolonial Belanda dalam penyelenggaraan pendidikan melakukan penggolongan pembiayaan pendidikan berdasarkan kelas-kelas sosial. Kelas sosial yang dikelompokkan terdiri dari 7 kriteria penggolongan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Penggolongan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah siswa dalam satu keluarga yang bersekolah di sekolah-sekolah desa milik pemerintah. Semakin sedikit yang bersekolah, maka biaya sekolah semakin tinggi, dan berlaku sebaliknya untuk keluarga yang menanggung biaya sekolah anaknya lebih dari satu, maka berlaku keringanan sebagaimana tabel diatas.

Kelas pembayaran yang diumumkan pemerintah kolonial Belanda diatas kemudian mengalami perubahan setahun kemudian. Perubahan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, perkembangan, dan pemikiran serta ditetapkan melalui besluit Resident Lampongsche Districten tang-

gal 12 November 1934, nomor 711 dengan ketetapan sebagai berikut:

Tabel 7: Tarif Pembayaran berdasarkan penghasilan orang Tua pada Sekolah Desa di Karesidenan Lampung

Kelas Pembayaran	Penghasilan terendah dalam sebulan	Penghasilan tertinggi dalam sebulan
1	f. 60	Tak terhingga
2	f. 40	f. 60
3	f. 25	f. 40
4	f. 12,5	f. 25
5	f. 7,5	f. 12,5
6	f. 3,5	f. 7,5
7	f. -	f. 3,5

Sumber: Majalah Pelita Marga, 1935.³⁹

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pemerintah kolonial Belanda melakukan penggolongan pembiayaan pendidikan berdasarkan kelas-kelas pembayaran berdasarkan penghasilan orangtuanya. Semakin rendah penghasilan orangtuanya, maka biaya pendidikan yang dibayarkan semakin rendah. Demikian juga apabila penghasilan orangtuanya tergolong besar, maka semakin besar juga biaya yang dikeluarkan untuk biaya sekolahnya.

Kelas pembayaran golongan 1 merupakan siswa dengan status ekonomi yang dapat dikatakan tertinggi. Kelas pembayaran yang harus dibayarkan orang tua murid dengan kriteria penghasilan dalam sebulan serendah-rendahnya f. 60 dan terbesar mencapai penghasilan tidak terhingga. Kelas pembayaran terendah berdasarkan besluit Resident Lampongsche Districten nomor 711 ialah golongan tujuh (7) yaitu kelas pembayaran yang dibayarkan orang tua siswa dengan kriteria memiliki penghasilan sebesar f. 0-3,5 dalam sebulan. Pengelompokan kelas pembayaran ini pada akhirnya memunculkan stratifikasi sosial dalam penyelenggaraan pendidikan hingga kini. Adapun perbandingan biaya sekolah dan subsidi dari pemerintah sebagaimana tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8: Perbandingan Uang Sekolah dan Subsidi Pemerintah pada Sekolah Desa di Karesidenan Lampung

Onder Afdeling	Uang Sekolah	Subsidi Pemerintah
Telukbetung	f. 5.352.25	f. 1.907.52
Kota Bumi	f. 5.765.36	f. 5.561.40
Kota Agung	f. 2.074.90	f. 1.142.14.
Sukadana	f. 4.393.38	f. 1.847.95
Menggala	f. 4.545.99	f. 5.604.07
Total	f. 22.131.88	f. 16.036.08

Sumber: Majalah Pelita Marga, 1937.⁴⁰

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa total pendapatan sekolah dengan sumber pendapatan melalui tarif sekolah untuk setiap siswa yang sekolah pada sekolah-sekolah desa di Lampung mencapai f. 22.131.88. Sedangkan dana sekolah yang diberikan pemerintah kolonial Belanda dalam bentuk subsidi pendidikan mencapai f. 16.036.08. dengan demikian, maka perhatian pemerintah kolonial Belanda dengan banyaknya sekolah-sekolah desa yang didirikan hanya mencapai sepertiga total dana yang dikeluarkan untuk masing-masing sekolah dalam satu tahun kalender pendidikan.

e. SDM Guru dan Kesejahteraan

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa penyediaan tenaga pengajar, karyawan dan pegawai pada sekolah desa merupakan domain pemerintahan desa tanpa campur tangan pemerintah kolonial Belanda. Persoalan gaji dan kesejahteraan guru ditentukan melalui kebijakan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk kemampuan keuangan desa. Para guru dan pegawai pada sekolah desa menjadi pegawai desa dan memperoleh gaji dari kas desa.

Kesejahteraan para guru di daerah Karesidenan Lampung semakin diperhatikan sejak masifnya pembukaan sekolah-sekolah desa hasil swadaya penduduk desa, dan tentunya semakin mendapatkan perhatian pemerintah kolonial Belanda. Gaji

atau penghasilan setiap guru desa di Karesidenan Lampung memiliki besaran yang berbeda-beda berdasarkan pada jenjang dan lamanya pengabdian.

Besaran gaji guru desa pada awalnya ditentukan pemerintah colonial Belanda berdasarkan surat Direktur Onderwijk en Kerodienst ddo tertanggal 21 Desember 1933 bernomor 34782/B. Ketentuan gaji guru dan kepala sekolah berlaku secara nasional di wilayah Hindia Belanda. Adapun ketentuan gaji guru dan kepala sekolah diberbagai daerah sebagai berikut.

Tabel 9: Perbandingan Gaji Guru dan Kepala Sekolah pada Sekolah Desa di Karesidenan Lampung

Tahun Mulai Bekerja	Gaji Guru	Gaji Kepala Sekolah
1-2 tahun	f. 10	f. 15
3-4 tahun	f. 11,5	f. 16,5
5-6 tahun	f. 13	f. 18
7-9 tahun	f. 14,5	f. 19,5
10-12 tahun	f. 16	f. 21
13-15 tahun	f. 17,5	f. 22,5
16-18 tahun	f. 19	f. 24
19-21 tahun	f. 20,5	f. 25,5
22-24 tahun	f. 22	f. 27
25-27 tahun	f. 23,5	f. 28,5
> 28 tahun	f. 25	f. 30

Sumber: Majalah Pelita Marga, 1935.⁴¹

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa semakin lama seorang guru mengabdikan, maka akan sebanding dengan gaji yang diperolehnya. Guru yang baru mulai mengajar pada sekolah desa diberikan gaji 10 gulden, dan kepala sekolah memperoleh 15 gulden. Gaji guru akan ditinjau kembali dan cenderung mengalami peningkatan setiap 2 tahun sekali untuk 5-10 tahun pertama, dan kenaikan setiap tiga tahun untuk masa kerja diatas sepuluh tahun.

Besaran gaji guru desa kemudian direvisi berdasarkan keputusan Residen Lam-

pung. guru-guru sekolah Desa di Karesidenan Lampung berdasarkan Besluit Tuan Besar Resident Lampongsche Districten tanggal 17 Desember 1932 Nomor 890 ialah sebagai berikut.

Tabel 10: Perbandingan Gaji Guru dan Kepala Sekolah setelah Revisi di Karesidenan Lampung

Tahun Mulai Bekerja	Gaji Guru	Gaji Kepala Sekolah
1-2 tahun	f. 15	f. 20
3-4 tahun	f. 16	f. 21
5-7 tahun	f. 17	f. 22
8-10 tahun	f. 18,5	f. 23,5
11-13 tahun	f. 20	f. 25
14-16 tahun	f. 21,5	f. 26,5
17-19 tahun	f. 23	f. 28
20-23 tahun	f. 26	f. 31
26 tahun	f. 27,5	f. 32,5

Sumber: Majalah Pelita Marga, 1940.⁴²

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa gaji guru pada sekolah desa di Karesidenan Lampung mengalami peningkatan sebesar f. 5 atau dari f. 10 menjadi f. 15 untuk 2 tahun pertama pengabdian sebagai pengajar. Hal ini sedikit berbeda dengan gaji guru di Pulau Jawa dengan penghasilan minimal f. 15 dan maksimal f. 20 untuk awal mengajar (Depdikbud, 1972 : 72). Ini berarti gaji guru setelah dilakukan perbaikan berdasarkan ketetapan Resident Lampung mengalami peningkatan sebesar 5 gulden. Gaji dan kesejahteraan guru pada sekolah desa akan mengalami peningkatan dengan masa kerja yang semakin lama. Gaji para guru akan terus meningkat dan sebanding dengan masa kerja yang dijalannya sebagai seorang guru dengan perkiraan aktif bekerja hingga 30 tahun.

Selain itu, terdapat informasi bahwa gaji kepala sekolah mendapatkan gaji sebesar f. 20 untuk 2 tahun pertama pengabdian sebagai kepala sekolah. Gaji kepala sekolah pada

sekolah desa akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan masa kerjanya dengan perkiraan aktif bekerja hingga 30 tahun mencapai f. 32,5. Perbedaan gaji yang diterima antara guru dan Kepala Sekolah dengan selisih gaji antara guru dan kepala sekolah hanya memiliki perbedaan 5 gulden.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan pendidikan pada masa politik etis semakin masif sejak Gubernur Jenderal Van Heutz mengizinkan pendirian sekolah-sekolah desa sejak tahun 1922, dengan sumber pembiayaan oleh masyarakat desa. Pembangunan sekolah, pengadaan tenaga pengajar dan anggaran gaji bersumber dari kas desa. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mulai terlibat dengan memberikan subsidi pendidikan sejak tahun 1922 hingga 1942. Jumlah sekolah di Karesidenan Lampung terdiri dari 45 sekolah desa, 4 sekolah rakyat dan 6 sekolah Lanjutan yang tersebar di Karesidenan Lampung baik terletak di Onder Afdeling Teluk Betung maupun Onder Afdeling Kota Agung.

Kesejahteraan guru dan kepala sekolah pada sekolah desa ditentukan berdasarkan keputusan Residen Lampung dengan memperhatikan masa bakti guru-guru sekolah Desa di Karesidenan Lampung. Besaran gaji guru desa dengan masa kerja 1-2 tahun sebesar f. 15, dan tertinggi f. 27,5 untuk masa kerja 26 tahun atau lebih. Untuk gaji kepala sekolah dengan masa kerja 1-2 tahun sebesar f. 20, dan tertinggi f. 32,5 untuk masa kerja 26 tahun bahkan lebih. Perbedaan gaji antara guru dengan kepala sekolah desa hanya selisih f. 5 dengan masa kerja yang sama.

Catatan akhir

¹Brugmans, 1987: 178; Lihat juga Maria,

Christina Lambert. Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900-1942, 1968: 2

²Brugmans, I.J. Politik Pengajaran. Dalam I.J. Brugmans, dan Baudet, H. Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan, 1987: 178;

³Brugmans, I.J, dan Baudet, H. Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan, 1987: 179

⁴Brugmans, I.J, dan Baudet, H. Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan, 1987: 179

⁵Gouda, Frances. Dutch Cultures Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942, 2007: 142.

⁶Makmur, Djohan dkk. Sejarah pendidikan di Indonesia zaman penjajahan, 1993: 66

⁷Fakhriansyah, M dan Intan Ranti PP. Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Politik Etis 1901-1930. Jurnal Pendidikan Sejarah, 2019.

⁸Makmur, Djohan dkk. Sejarah pendidikan di Indonesia zaman penjajahan 1993: 73

⁹Brugmans, I.J. Politik Pengajaran., 1987: 179

¹⁰Daliman, A. Sejarah Indonesia Abad XIX- Awal Abad XX. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012 dalam Nurhusna, Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900-1930, 2020: 24

¹¹Karsiwan. Kejayaan Lada Hingga Praktik Perburuhan di Lampung Abad XVI-XX., 2019: 48

¹²Broersma, R. De Lampongsche Districten, 1916: 30

¹³Rickleffs, M. C. Sejarah Indonesia Modern, 1995: 34; lihat juga Daliman, A. Sejarah Indonesia Abad XIX- Awal Abad XX, 2012: 38

¹⁴Shiraishi, Takashi. ZAMAN BERGERAK: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1921-1926, 1997: 37

¹⁵Sjamsu M, Amral. Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905-1955, 1956: 13

¹⁶Circa. *Officiële opening van de sluis in de buurt van Metro, Lampongs*. Leiden University Libraries, 1935. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:702868>

¹⁷Benoit, Daniel, et al. *Transmigration In Indonesia*, 1989: 85

¹⁸Karsiwan. *Pembangunan Irigasi sebagai Kebijakan Etis Pemerintah Koloial Belanda di Pringsewu Lampung Tahun 1927*. *Jurnal Pesagi*, 2013: 48

¹⁹Heerendiensten merupakan aturan kerja sukarela yang menjadi wajib kerja masa kolonial Belanda diberbagai wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Lampung, aturan Heerendiensten dapat di lihat pada *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie No. 407 Tahun 1919 dan Staatsblad Van Nederlandsch-Indie No.438, Tahun 1931*.

²⁰Circa. *Stuwdam in de buurt van Metro, Lampongs*. Leiden University Libraries, 1935.

²¹<http://hdl.handle.net/1887.1/item:705044>

²²Kasdi, *Memahami Sejarah*, 2005: 10

²³Herlina Herlina, Nina. *Metode Sejarah*, 2008, 7-15.

²⁴Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, 2013: 77-78

²⁵Suwignyo, Agus. *Pendidikan, Kekuasaan, dan Kolonialisme*, 2019.: 113

²⁶Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia*, 2011: 3

²⁷Zed, Mestika. "Engku Mohammad Sjafe'i dan INS Kayutanam: Jejak Pemikiran Pendidikannya", dalam *TINGKAP Vol. VIII No. 2 Th. 2012*, hlm. 173-188, 2012: 174

²⁸Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia*: 20; lihat juga Imadudin, *Pendidikan Kolonial dan Politik Asosiasi: Kajian Atas Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadin-ingrat (1877-1943)*. dalam *Patanjala*. Vol. 7 No. 3 September 2015: 546.

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebu-

dayaan RI. *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, 1976: 52

³⁰Brugmans, I.J. *Politik Pengajaran*. Dalam I.J, Brugmans, dan Baudet, H. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, 1987: 179

³¹Nurhusna Afandi, Alifia dkk. *Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900-1930*. *Jurnal Artefak*, 2020: 27

³²Probonegoro, KRTAA. *Lampung Tanah Lan Tiyangipun*, 1940: 24.

³³*Majalah Pelita Marga*, 1939: 123.

³⁴*Majalah Pelita Marga*, 1937: 78.

³⁵*Majalah Pelita Marga*, 1937: 79.

Majalah Pelita Marga, 1937: 78.

Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Tahun 1926. No. 530

³⁶*Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Tahun 1940*. No.285

³⁷*Majalah Pelita Marga*, 1937: 76.

³⁸*Majalah Pelita Marga*, 1935: 24.

³⁹*Majalah Pelita Marga*, 1937: 76.

⁴⁰*Majalah Pelita Marga*, 1935: 36.

⁴¹*Majalah Pelita Marga*, 1940: 18.

Daftar Referensi

Ahmadi, Abu. *Sejarah Pendidikan*. Cv Toha Putra: Semarang, 1991.

Benoit, Daniel, et al. *Transmigration In Indonesia*. Departemen Transmigrasi RI: Jakarta, 1989.

Broersma, R. *De Lampongsche Districten*. Batavia Javasche Boekhandel, 1916.

Brugmans, I.J, dan Baudet, H. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Buku Obor, 1987.

Brugmans, I.J. *Politik Pengajaran*. Dalam I.J, Brugmans, dan Baudet, H. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Buku Obor, 1987.

Daliman, A. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pendidikan di Indonesia 1900-1974, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Gostchalk, Louis. Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto). Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1983.
- Herlina, Nina. Metode Sejarah. Bandung: Satya Historika, 2008.
- Karsiwan. Kejayaan Lada Hingga Praktik Perburuhan di Lampung Abad XVI-XX. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta, 2019.
- Kasdi, Aminuddin. Memahami Sejarah. Surabaya: Unesa Univ. Press, 2005.
- Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah, Edisi kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013
- Makmur, Djohan dkk. Sejarah pendidikan di Indonesia zaman penjajahan. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, 1993.
- Nasution, S. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Notosusanto, Nugroho. Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman). Inti Idayu: Jakarta, 1984.
- Probonegoro, KRTAA. Lampung Tanah Lan Tiyangipun. Jakarta: Balai Pustaka, 1940.
- Ramadhan KH. Transmigrasi: Harapan dan Tantangannya. P.D Karya Jaya Bhakti : Jakarta, 1993.
- Rickleffs, M. C. Sejarah Indonesia Modern. Gajah Mada Press : Yogyakarta, 1995.
- Shiraishi, Takashi. ZAMAN BERGERAK: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1921-1926. Terj. Hilmar Farid. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 1997.
- Sjamsu M, Amral. Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905-1955. Djambatan: Djakarta, 1956.
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Tahun 1926. No. 530
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Tahun 1940. No.285
- Suwignyo, Agus. Pendidikan, Kekuasaan, dan Kolonialisme. Quantum Jogja: Jogjakarta, 2019.
- Thesis Or Dissertation**
- Maria, Christina Lambert. Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900-1942. PhD Dissertation. Australian National University, 1968.
- Journal Article**
- Fakhriansyah, M dan Intan Ranti PP. (2019). Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Politik Etis 1901-1930. Jurnal Pendidikan Sejarah Vol 8 No. 2 Juli 2019.
- Imadudin, Iim. (2015). Pendidikan Kolonial dan Politik Asosiasi: Kajian Atas Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1877-1943). dalam Patanjala. Vol. 7 No. 3 September 2015: 543-558.
- Karsiwan. Pembangunan Irigasi sebagai Kebijakan Etis Pemerintah Koloial Belanda di Pringsewu Lampung Tahun 1927. Jurnal Pesagi Vol 1, No. 3 Tahun 2013.
- Nurhusna Afandi, Alifia dkk. Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900-1930. Jurnal Artefak Vol. 7 No. 1 April 2020.
- Zed, Mestika. "Engku Mohammad Sjafe'i dan INS Kayutanam: Jejak Pemikiran Pendidikannya", dalam TINGKAP Vol. VIII No. 2 Th. 2012, hlm. 173-188, 2012.
- News Or Magazine Article**
- Majalah Pelita Marga. 1937. Perpustakaan Nasional, Koleksi
- Majalah Pelita Marga. 1939. Perpustakaan Nasional, Koleksi
- Majalah Pelita Marga. 1940. Perpustakaan Nasional, Koleksi
- Website Content**
- Circa. Javanen bij hun debarkatie in Oosthaven, Lampongs. Leiden University Libraries, 1935.

<http://hdl.handle.net/1887.1/item:710234>
Circa. Officiële opening van de sluis in de
buurt van Metro, Lampongs. Leiden
University Libraries, 1935. [http://hdl.
handle.net/1887.1/item:702868](http://hdl.handle.net/1887.1/item:702868)

Circa. Stuwdam in de buurt van Metro,
Lampongs. Leiden University Libraries,
1935.

<http://hdl.handle.net/1887.1/item:705044>